



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
REVIEW RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017-2022

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KOTA YOGYAKARTA
2020

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi dan

persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Yogyakarta terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD) memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan -Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di Komunikasi dan Informatika.

Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 serta Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019, dalam perkembangannya perlu dilakukan **review** terhadap Renstra sesuai dengan keadaan dan prediksi-prediksi yang akan terjadi.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

- 9) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 10) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 12) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 13) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- 14) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029;
- 15) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta
- 16) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2017-2022
- 17) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2017 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
- 18) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan **Review** Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2017-2022 mendatang sebagai implementasi visi dan misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berdasarkan perkembangan yang dialami dan akan diprediksi di waktu yang akan datang.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017 s/d 2022 ini yaitu :

- 1) Menjadi Pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kota Yogyakarta
- 2) Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka 5 tahun
- 3) Menjadi Pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perangkat daerah
- 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib
- 6) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Sistematika Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut;

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

BAB III. ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaah Renstra Kementrian dan Renstra Perangkat Dearah Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Srategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV . TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
- 4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.

2.1.1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik

2.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

2.1.3. Struktur Organisasi

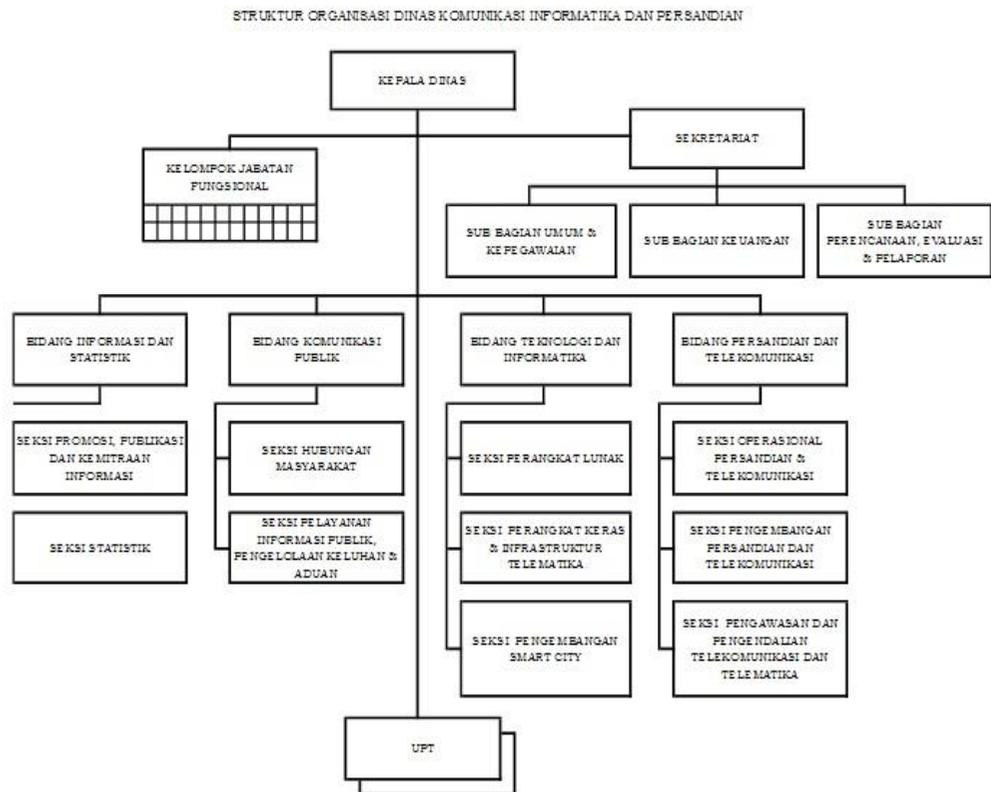
- a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik.

- b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- c. Kepala Kantor sebagaimana dimaksud butir 2 diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Bidang Informasi dan Statistik, terdiri dari
 - 1) Seksi Promosi, Publikasi, dan Kemitraan Informasi
 - 2) Seksi Statistik
- d. Bidang Komunikasi Publik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Hubungan Masyarakat
 - 2) Seksi Pelayanan Informasi Publik, pengelolaan keluhan dan aduan
- e. Bidang Teknologi dan Informatika, terdiri dari :
 - 1) Seksi Perangkat Lunak
 - 2) Seksi Perangkat Keras dan Infrastruktur Telematika
 - 3) Seksi Pengembangan Smart City
- f. Bidang Persandian dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Operasional Persandian Telekomunikasi
 - 2) Seksi Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi
 - 3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi dan Telematika
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional;

Secara skematis untuk Struktur Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagaimana dituangkan dalam skema sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

2.2.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah 46 orang, terdiri dari : 39 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 3 orang Tenaga Bantuan (Naban) dan 4 orang tenaga teknis .

Tabel 2.2.1
Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan Eselon :

Eselon	Jumlah
II	0
III	3
IV	12
Non Eselon	24

Perbandingan jumlah karyawan berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	1
III	33
II	5
I	0

Perbandingan jumlah karyawan berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	0
S2	5
S1	16
DIV	1
D3	7
SMA	9
SLTP	1

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Tingkat Pendidikan paling tinggi adalah S2 dengan jumlah pegawai 5 orang, paling rendah adalah lulusan SLTP sejumlah 1 orang, sedangkan jumlah lulusan S1 sejumlah 16 orang.

2.2.2. Perlengkapan

Asset perlengkapan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berupa sarana dan prasarana kerja dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Daftar Jenis Barang Pendukung Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan
Persandian Kota Yogyakarta
Per 31 Desember 2016

No	JENIS BARANG	JUMLAH
1.	Kendaraan Roda Empat	4
2.	Kendaraan Roda Dua	15
3.	Ruang Rapat	1
4.	Komputer	57
5.	Printer	27
6.	Notebook	31
7.	Telepon	419
8.	Mesin Faximile	12
9.	Meja Kerja	78
10.	Kursi Kerja	188
11.	Meja Rapat	14
12.	Kursi Rapat	24
13.	Almari	57
14.	Filing Kabinet	28

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2012 - 2016, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau

indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika dan Kegiatan Penatalaksanaan Persandian di Bagian Umum Tahun 2012 – 2016 (Tabel 2.3.1)

2.3.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan SKPD dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dilihat dari dua perangkat daerah sebelumnya yakni Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika serta Kegiatan Penatalaksanaan Persandian di Bagian Umum. Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan SKPD (Tabel 2.3.2)

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kota Yogyakarta

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Bagian Humas dan Informasi																		
Deseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media massa (Majalah, Radio, Tv)				503	506	509	512	515	2293	1372	1766	1965	2665	455.86%	271.15	346.95%	383.19%	517%
Deseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui media baru seperti website (Internet)				1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	1kali/hari	100%	100%	100%	100%	100%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Deseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Tradisional seperti Pertunjukan Rakyat				1 kali / th	1 kali / th	1 kali / th	1 kali / th	1 kali / th	2	2	10	8	5	200%	200%	1000%	800%	500%
Deseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah atau diskusi				1 kali / th	1 kali / th	1 kali / th	1 kali / th	1 kali / th	1	8	15	16	18	100%	800%	1500%	1600%	1800%
Deseminasi dan Pendistribusian Informasi melalui Media Luar ruang seperti bulletin, leaflet, booklet, brosur atau baliho				75 kali	76 kali	77 kali	78 kali	79 kali	102	334	398	427	550	136%	439%	516%	547%	696%

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Bagian Teknologi Informasi dan Telematika																		
Meningkatnya jumlah aplikasi telematika yang dikelola				46 aplikasi	48 aplikasi	50 aplikasi	52 aplikasi	54 aplikasi	46 aplikasi	48 aplikasi	50 aplikasi	56 aplikasi	56 aplikasi	100%	100%	100%	107.69%	104%
Tertanganinya keluhan telekomunikasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Kenaikan Bandwith Internet				13 mbps	16 mbps	20 mbps	26 mbps	34 mbps	11.5 mbps	36 mbps	50 mbps	150 mbps	400 mbps	88.46%	225%	250%	576%	1176%
Kenaikan Bandwith Intranet				1 mbps	1 mbps	1.5 mbps	2 mbps	2,5 mbps	1 mbps	1 mbps	2 mbps	5 mbps	25 mbps	100%	100%	133%	250%	1000%
Bagian Umum (Persandian)																		

	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Umum, Keuangan Sekretariat Daerah, dan Kerumahtangaan – Penatalaksanaan Persandian				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Bagian Humas dan Informasi Setda Kota Yogyakarta

Uraian ***)	Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	2.386.623.700	2.912.397.964	2.432.387.400	3.092.954.475	3.004.977.918	2.239.255.300	2.586.017.192	2.160.164.175	2.986.777.164.5	2.719.539.226	93.8	88.79	88.80	96.5	90.50		

Kegiatan Penatalaksanaan Persandian Bagian Umum

Uraian ***)	Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Uraian ***)	Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pentatalaksanaan Persandian	-	-	-	-	277.972.000	-	-	-	-	252.743.617	-	-	-	-	90,92		

Bagian Teknologi Informasi dan Telematika

Uraian ***)	Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program pengembangan Komunikasi Teknologi Informasi dan	6.618.057.593	9.468.678.849	7.612.173.300	8.418.052.600	16.661.323.824	5.946.513.873	8.294.102.518	5.171.161.067	7.563.300.748	15.284.601.110	89,85	87,60	67,98	89,84	91,74		

Uraian ***)	Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran (Rp) pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran (%)Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Telematika																	

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa pencapaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dilihat dari pencapaian 3 perangkat daerah besar yang digabungkan yakni Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT) dan Kegiatan Penatalaksanaan Persandian di Bagian Umum. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar indikator telah tercapai dengan baik yakni diatas 100% pada periode renstra sebelumnya. Namun ada juga beberapa yang masih rendah capaiannya seperti pada program peningkatan dan sarana aparatur yang dilaksanakan oleh Bagian Teknologi Informasi dan Telematika, dalam beberapa periode tahun renstra masih rendah bahkan ada yang dibawah 50% hal ini disebabkan dalam pelaksanaan program peningkatan sarana dan prasarana tersebut sifatnya untuk jaga-jaga dimana dilakukan untuk pembelian solar guna penjagaan alat genset agar tetap hidup manakala terjadi pemadaman arus listrik, jumlah presentase yang sedikit tersebut dikarenakan pada beberapa tahun renstra tidak banyak terjadi pemadaman arus listrik sehingga pembelian solar untuk genset juga sedikit. Hal inilah yang menyebabkan pencapaian program ini sangat rendah.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

- 1) Kekuatan
 - a) Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
 - b) Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
 - c) Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
 - d) Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah

daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri

e) Adanya sarana dan prasarana

2) Kelemahan

a) regulasi / peraturan yang mengatur pengembangan TIK, Informatika , jasa pos dan telekomunikasi.

b) Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas

c) Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD

d) Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.

e) Data yang ada kurang lengkap

b. Faktor Eksternal

1) Tantangan

a) Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government

b) Pengelolaan Website Pemerintah Kota Yogyakarta secara menyeluruh dan dinamis

c) Legalisasi penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi

d) Jaminan keamanan sistem informasi

e) Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat

2) Peluang

a) Lembaga atau institusi pendidikan di Kota Yogyakarta yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika.

b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi

c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat

d) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat

e) Penyelenggaraan statistik sektoral

f) Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah

g) Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

3) Ancaman

a) Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi

b) Kebebasan penggunaan media sosial.

c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

2.4.2. Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi smart city
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kota Yogyakarta, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kota Yogyakarta. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

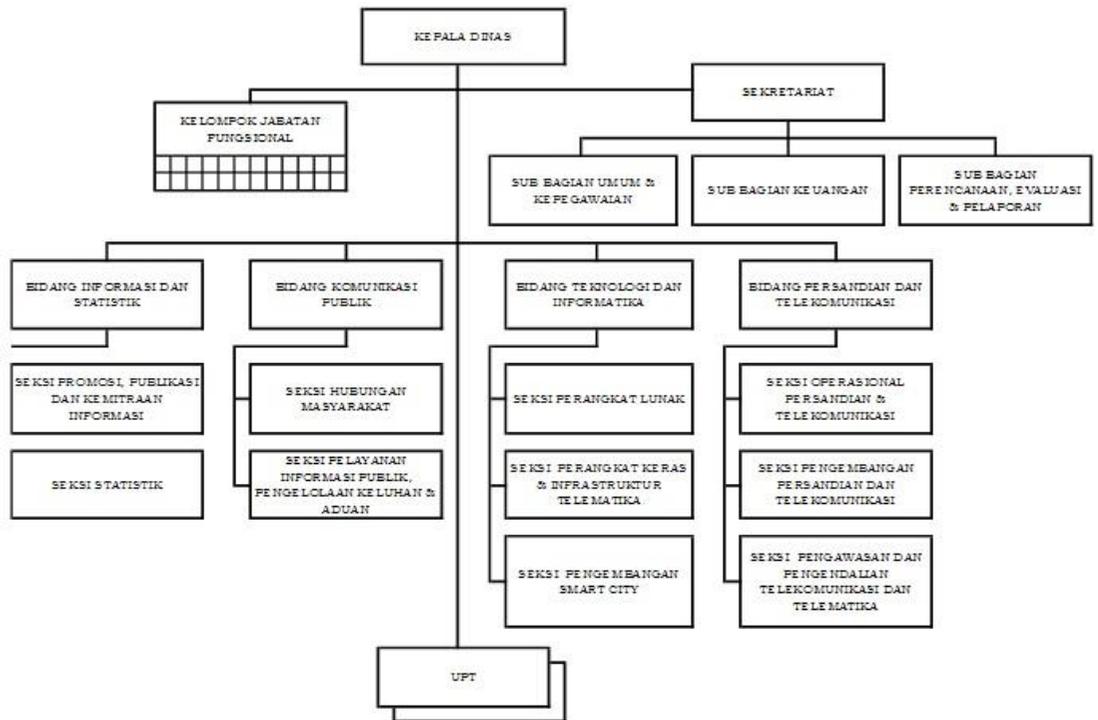
Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga

penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah. Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah kota Yogyakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Susunan, Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta maka Diskominfosandi mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik; Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika persandian dan statistik. dengan struktur sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN



Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian, seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaan informasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

	PROGRAM/KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Telematika			
	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Informasi dan Telematika	Kerbatasan SDM (tenaga programmer)	Kerjasama dengan penyedia barang dan jasa bidang TI
	Pengelolaan Perangkat Keras dan Jaringan Teknolgi Informasi dan Telematika	Keterbatasan personil yang mumpuni Prosedur yang belum tertata dengan baik	Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga Menyusun dan membentuk kebiasaan bekerja dengan prosedur standar
	Pengembangan Smart City	Regulasi terkait smart city yang dijadikan pedoman belum tersusun	Menggunakan dokumen kajian implementasi smart city yang sudah disusun
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik			
	Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi	Belum adanya dukungan dana untuk kegiatan komunikasi dari pusat	Diikutsertakan pada kegiatan yang lain
Program Peningkatan Komunikasi Publik			
	Kehumasan dan Pelayanan Informasi	Keterbatasan media informasi Perkembangan isu-isu di media sosial yang tidak terbendung	Kerjasama dengan berbagai media massa Koordinasi yang lebih intensif untuk menjawab isu-isu media sosial yang berkembang
	Pengelolaan Keluhan dan Aduan	Adanya OPD yang belum responsif	Koordinasi antar operator OPD yang lebih intensif
Program Pengelolaan Informasi dan Statistik			
	Pengelolaan Informasi dan Data Statistik	Keterbatasan SDM	Kerjasama dengan BPS Kota Yogyakarta
Program Peningkatan Pelayanan Persandian			
	Operasional Persandian dan Telekomunikasi	- Keterbatasan SDM - Keterbatasan sarana dan prasarana - Keterbatasan plafon anggaran	- Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain - Melakukan pinjam pakai barang - Mengoptimalkan plafon anggaran yang

			ada
	Pengembangan Persandian dan Telekomunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Keterbatasan sarana dan prasarana - Keterbatasan plafon anggaran - Belum memiliki standar keamanan informasi di Pemkot Yogyakarta 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain - Melakukan pinjam pakai barang - Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada - Melaksanakan tahap perancangan standar keamanan informasi
	Pengawasan dan Pengendalian Komunikasi dan Informatika	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM - Belum adanya regulasi daerah yang jelas - Keterbatasan sarana dan prasarana - Keterbatasan plafon anggaran 	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk Tim Kegiatan yang melibatkan OPD Lain - Mengoptimalkan regulasi daerah yang ada walaupun dilaksanakan secara parsial - Mengoptimalkan sarana prasarana yang ada - Mengoptimalkan plafon anggaran yang ada

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan

dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2017 – 2022 adalah :

“ Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan “

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta 2017-2022, yaitu :

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- 2) Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- 3) Memperkuat Moral, Etika dan Budaya Masyarakat Kota Yogyakarta
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- 5) Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- 6) Membangun sarana prasarana publik dan pemukiman
- 7) Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke tujuh yaitu “ Meningkatkan tatakelola pemerintahan yang baik dan bersih “.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :

Tabel 3.2.
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Terhadap
Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan Tatakelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Belum optimalnya pengelolaan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Sumber daya yang terbatas 3. Belum semua perangkat daerah diarahkan untuk berbasis teknologi informasi 4. Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat 5. Legalitas penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi 6. Terbatasnya jumlah tenaga teknis/programmer dan tenaga ahli bidang TI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang komunikasi dan informasi 2. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik 3. Pengembangan infrastruktur jaringan di seluruh kota 4. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparaturnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal. 5. Adanya sarana dan prasarana

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra DIY

Berdasarkan telaah Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 – 2019, maka ditemuilah keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran sesuai dengan Renstra tersebut, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3.a
Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kominfo

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan	Adanya kesenjangan kemampuan pelaksanaan TIK di masyarakat	Belum adanya distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat Kota Yk	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik
	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan sosial budaya, pertahanan dan keamanan	Pembangunan infrastruktur jaringan	Legalitas penyelenggara n jasa pos dan telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur jaringan yang terus dilakukan di Kota Yogyakarta
	Terselenggaranya tatakelola komunikasi dan infomatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	Pelaksanaan SOP tata kelola informasi internal yang belum maksimal	Saran prasarana komunikasi internal penunjang operasional pemerintahan	Kewenangan dalam menangani permasalahan TIK jasa pos dan telekomunikasi
	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola	Pembangunan sistem aplikasi TI dalam menerapkan egovernment	Jumlah programmer yang masih sedikit	Terjalannya kerjasama bidang TI dengan pihak ke tiga dan Kemampuan

	Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.			integrasi sistem pelayanan publik
--	---	--	--	-----------------------------------

Tabel 3.3.b
Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Sasaran Renstra Diskominfo DIY	Permasalahan PD Terkait Dengan Sasaran Renstra Diskominfo DIY	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya kualitas infrastruktur dan Pelayanan Teknologi Informasi dan Telematika	Pembangunan infrastruktur TI yang tidak dimulai dengan kesepakatan akan dibangun melalui suatu pilihan pada basic program tertentu, bagaimana nantinya semua terintegrasinya sub infrastruktur ini sehingga bisa dimanfaatkan oleh semua pihak	Belum optimalnya komunikasi dan koordinasi yang bersifat membangun sinergisitas, koordinasi baru pada penyampaian informasi sepihak, belum ada follow up untuk merangkai infrastruktur dasar yang telah dibangun	Bentuk komunikasi dioptimalkan menjadi koordinasi yang bersifat membangun pola kerja sinergi antara OPD Kominfo DIY dan Kota Yogyakarta Locus Kota Yogyakarta akan secara langsung menikmati keberadaan infrastruktur yang dibangun oleh DIY karena menggunakan wilayah di Kota Yogyakarta
2	Tersedianya informasi kepada masyarakat	Pola komunikasi, tidak ada hirarki distribusi informasi atau hal-hal penting yang bisa memperkuat	DIY dan Kota terjebak pada batas-batas kewenangan, tidak membangun komunikasi yang	Keberadaan media massa di Kota Yogyakarta yang sudah “sehat” secara korporate dan idealismenya

		seperti isu-isu nasional yang dilimpahkan kepada daerah sehingga Kota bisa mengambil peran	intensif	dan berpengaruh kepada masyarakat .
--	--	--	----------	-------------------------------------

3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Faktor faktor pendorong dan penghambat dari Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan peraturan daerah Kota Yogyakarta No 2 Tahun 2010 tentang Rencana tata Ruagn Wilayah Kota Yogyakarta, Salah satu rencana struktur tata ruang di Kota Yogyakarta adalah sistem jaringan telekomunikasi yang diarahkan untuk kebutuhan informasi, dibedakan menjadi jaringan yang dikelola oleh BUMD/ BUMN dan swasta yang terdiri dari jaringan kabel dan nirkabel. Pengembangan dan pengendalian jaringan telekomunikasi yang menggunakan menara diarahkan pada penggunaan menara bersama untuk mendukung efisiensi dan efektifitas pemanfaatan ruang. Pengembangan jaringan telekomunikasi ini tersebar di seluruh kecamatan.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana telekomunikasi yang terpadu, adil dan merata di seluruh wilayah daerah dilaksanakan untuk mendukung terlaksananya daerah sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Yogyakarta

2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat ; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Penyelenggaraan Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumberdaya seoptimal mungkin, memenuhi standar kualitas layanan prima
9. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang menguasai teknologi informasi.

Kedepannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kota Yogyakarta tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kota Yogyakarta saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep *JOGJA SMART CITY*. Konsep ini akan menempatkan Kota Yogyakarta sebagai kota cerdas yang merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara daring yang sudah lama dilakukan, menjadi lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel. Hal itu bisa terwujud dengan terbangun dan terkelolanya sistem data besar, *command centre*, pengelolaan lalu lintas dan parkir, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, Wi-Fi gratis di *public space* secara daring dan digital, serta pengembangan aplikasi yg lebih mudah dan sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini tidak hanya berhenti pada digitalisasi pengelolaan pemerintah dan pelayanan ke masyarakat melalui daring. Jogja Smart City pada tindak lanjutnya juga menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas, yaitu ekosistem yang lingkungan yg tertata dan nyaman bagi siapa saja.

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka peningkatan informasi publik. Hal ini juga mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam isu strategis tatakelola RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik. Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini

maka penduduk di Kota Yogyakarta diharapkan dapat memperlancar informasi dan semakin memudahkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, tidak cukup hanya dengan melaksanakan ketugasan secara normatif, namun perlu dilakukan inovasi agar pelayanan publik semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Visi Dan Misi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Melihat hasil analisis internal dan eksternal, kondisi umum daerah serta sesuai dengan fungsi dan tugas Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2016 tentang Fungsi, Rincian, Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, maka Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta adalah :

Visi

“TERCIPTANYA PELAYANAN PUBLIK YANG BAIK MELALUI PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG HANDAL MENUJU YOGYAKARTA SMART CITY”

Misi

1. Meningkatkan kualitas dan sebaran layanan deseminasi informasi melalui kemitraan dengan penyelenggara media dan mengikuti perkembangan teknologi informasi
2. Memberdayakan potensi komunikasi di masyarakat dan peningkatan kerjasama dengan lembaga komunikasi dan informatika
3. Mendukung proses kerja internal Pemerintah Kota Yogyakarta dengan pengembangan aplikasi dan sistem informasi manajemen yang handal, update dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
4. Membangun kualitas jaringan teknologi informasi yang mandiri, terintegrasi dan mampu bersinergi dengan pihak-pihak yang memiliki komitmen terhadap pengembangan smart city di Kota Yogyakarta
5. Menciptakan sistem kerja berbasis teknologi informasi yang handal dan terjamin keamanannya.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi dan komunikasi

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2017-2022 berdasarkan hasil review sebagai berikut .

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Perwal Nomor 52 Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Formula Indikator Sasaran PD	Realisasi Sasaran PD			Target		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Layanan Informasi Publik Meningkat	Indeks Layanan Informasi Publik	(20% Pemanfaatan data + 20% tindak lanjut aduan + 60% pemanfaatan teknologi informasi dan telematika) dikali 100	62,38	67,45	75,18	74,00	75,84	86,93
2	Keamanan Informasi meningkat	Indeks pengamanan informasi	(70% kinerja pengamanan + 30% pembinaan) dikali 100	75,70	79,26	81,40	84,40	88,00	94,00

Program PD	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	Realisasi Program PD			Target Program PD		
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	$(\text{Jumlah tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi masyarakat dalam } 2 \times 24 \text{ jam} / \text{Total aduan, pertanyaan, usul, saran, dan informasi}) \times 100\%$	96,00%	93,76%	95,49%	96,00%	96,50%	97,00%
Program Aplikasi Informatika	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	$((\text{Jumlah ruang publik yang terpasang free wifi} / \text{Jumlah ruang publik}) + (\text{Jumlah ruang publik yang terpasang CCTV} / \text{Jumlah ruang publik})) / 2 \times 100$	19,93%	32,00%	43,22%	40,93%	40,93%	71,80%
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	$(\text{Jumlah aplikasi yang dibangun} / \text{Jumlah rencana aplikasi}) \times 100\%$	57,32%	63,69%	77,07%	75,16%	80,89%	86,62%
	Persentase Kelancaran Pelayanan Pemeliharaan Sarana Telekomunikasi	$(\text{Jumlah Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi yang Tertangani} / \text{Jumlah Kasus Pengaduan Kerusakan dan Penataan Sarana Telekomunikasi}) \times 100\%$	-	-	-	-	100%	100%
	Persentase pelayanan dan pengawasan untuk penyelenggaraan telekomunikasi dan informasi	$((\text{Jumlah pengajuan rekomendasi yang terlayani} / \text{Total jumlah pengajuan rekomendasi}) + (\text{Jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik yang terawasi} / \text{Total jumlah menara telekomunikasi dan fiber optik})) / 2 \times 100\%$	-	-	-	-	85%	90%
	Persentase Kelancaran Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	$(\text{Jumlah OPD/Unit Kerja yang tergabung di dalam Jaringan Komunikasi Sandi Internal Pemkot Yogyakarta} / (\text{Jumlah OPD/Unit Kerja di Pemkot Yogyakarta})) \times 100\%$	-	-	-	-	100%	100%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	$(\text{Jumlah jenis data yang dimanfaatkan} / \text{Total jenis data}) \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase pengamanan informasi	$\text{Jumlah kasus yang tertangani dibagi jumlah kasus} \times 100\%$	100%	101,7%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi	$\text{Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan prosedur pengamanan informasi dibagi jumlah perangkat daerah} \times 100\%$	19%	26,90%	38%	38%	60%	80%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN KEBIJAKAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian adalah :

1. Peningkatan pengelolaan informasi dan statistik
2. Peningkatan komunikasi publik
3. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
4. Peningkatan pelayanan persandian

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Meningkatkan pengelolaan media informasi pemerintah
2. Meningkatkan sosialisasi kebijakan pemerintah melalui berbagai media
3. Meningkatkan kerjasama dengan BPS dalam penerbitan buku statistik
4. Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
5. Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
6. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
7. Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
8. Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
9. Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government
10. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
11. Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
12. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatik

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Visi : Meneguhkan Kota Yogyakarta Sebagai Kota Nyaman Huni dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berdaya Saing Kuat Untuk Keberdayaan Masyarakat Dengan Berpijak Pada Nilai Keistimewaan			
Misi 7 : Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Layanan Informasi Publik Meningkatkan Keamanan Informasi	Layanan Informasi Publik Meningkat	Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Statistik	Meningkatkan Pengelolaan Media Informasi Pemerintah
			Meningkatkan Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Melalui Berbagai Media
			Meningkatkan Kerjasama dengan BPS dalam penerbitan Buku Statistik
		Peningkatan Komunikasi Publik	Meningkatkan pengelolaan kehumasan dan pelayanan informasi
			Meningkatkan pengelolaan keluhan dan aduan masyarakat
		Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan telematika pada ruang publik
			Meningkatkan pembangunan aplikasi untuk mewujudkan e-government
			Meningkatkan pengetahuan teknologi informasi bagi aparatur
			Meningkatkan sarana prasarana untuk mendukung e-government

	Keamanan Informasi	Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
			Meningkatkan Pengamanan Sinyal Frekuensi
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang diakomodir dalam Renstra OPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta berjumlah 8(delapan) Program dan 17 (tujuh belas) kegiatan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

No	Program / Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1.1.	Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
1.2.	Penyediaan Jasa, Peralatan dan perlengkapan Kantor
1.3.	Penyediaan Jasa pengelola Pelayanan Keuangan
2	Program Peningkatan Sarana dan Aparatur
2.1.	Penyediaan Jasa pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3.1.	Bimbingan Teknis dan Diklat Peningkatan Kapasitas Aparatur
4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengendalian dan Laporan Kinerja OPD
5	Program Pengelolaan Informasi dan Statistik
5.1.	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Data Statistik
	Kegiatan Promosi Publikasi dan Kemitraan Informasi
6	Program Peningkatan Komunikasi Publik
6.1	Kegiatan Pelayanan Kehumasan dan Informasi
6.2	Kegiatan Pengelolaan Keluhan dan Aduan
7	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan telematika
7.1	Pengelolaan Aplikasi Teknologi Infomrasi
	Pengeloalan Perangkat Keras dan jaringan Teknologi Infomatika
	Pengembangan Smart City
8	Program Peningkatan Pelayanan Persandian
8.1	Kegiatan Operasional Persandian
8.2	Kegiatan Pengembangan Persandian
8.3	Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Telekomunikasi

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sesuai dengan pencermatan terhadap data RPJMD 2017-2022 berdasarkan Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 seperti tersebut dalam Tabel 7 berikut kami berikan hasil review Renstra Diskominfo sandi sesuai tabel dibawah :

Tabel 7
Hasil Review Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
SKPD Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Indeks Layanan Informasi Publik	61.98	61.98	67.24	72.21	77.18	82.15	86.93	86.93%
	Prosentase pemanfaatan data untuk pembangunan	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2x24 jam	94	94	95	95.50	96	96.50	97	97

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	9	(10)
	Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik	19.93	19.93	30.43	40.93	51.43	61.93	71.80	71.80
	Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun	57.32	57.32	63.69	69.43	75.46	80.89	86.62	86.62
2	Indeks Pengamanan Informasi	75.70	75.70	78.40	81.40	84.40	87.10	92.80	92.80
	Persentase pengamanan informasi	100	100	100	100	100	100	100	100
	Persentase pengamanan informasi	19	19	23	38	48	57	76	76

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD

Demikian Review Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala dan staf Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dan diketahui pula oleh stakeholder.

Kepala
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

IG. Trihastono, S.Sos,MM
NIP. 19690723 199803 1005